

PENDIDIKAN JALAN TENGAH DI KERAJAAN SIAK (1915-1945)

Wilaela

Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau

This research discusses about what and how the educational system during the reign of the Sultan Syarif Kasim II in Siak. The finding of this research shows that after Hindia-Belanda regime opened the lower school such as Hollandsch Inlandsch School, Inlandsch School and Sekolah Desa, then the Sultanate also established some Islamic-based school such as Madrasah Taufikiyah, male school. In fact, his wife also opened some islamic-based school for girls that focused on girl specific skills and Madrasah Anisa. The opening of these schools was a sign showed by the Kingdom that they were not going along with colonialism and also it was percieved as a way to increase the popularity and influence of Siak Kingdom that had gradually decreased. At the end this action was being taken for the sustainability of the Malay Kingdom as the dissemination of Islam and educatio.

Kata kunci: Kerajaan Siak, pendidikan, budaya Melayu,

Pendahuluan

Sebelum Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan modern pada awal abad ke-20, masyarakat Melayu di Kerajaan Siak (1723-1945) dapat dikatakan telah melek huruf Arab Melayu. Mereka telah mengenal Pendidikan Agama Islam yang berlangsung secara tradisional dan bersifat asli Indonesia (*indigenous*). Kemudian tatkala Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sekolah, reaksi masyarakat berbeda-beda, tetapi umumnya mereka menolaknya.

Mereka bukan menolak sistem pendidikan modern, tetapi mereka tidak setuju dengan sistem pendidikan *gouvernement*. Selain karena sistem itu baru dan berbeda dari sistem tradisional, juga karena pemerintah kolonial Belanda adalah penjajah dan kafir. Apalagi pendidikan tradisional dipandang tidak menarik dan tidak memadai lagi dalam memenuhi tuntutan pendidikan bumiputera. Faktor lainnya adalah perempuan yang dicampur dengan anak laki-laki juga menuai kontroversi karena berbagai keterbatasan sosial budaya dan

merupakan suatu yang baru. Akan tetapi, dalam semangat zaman (*zeitgeitz*), sekolah perempuan (*meisjesscholen*) menjadi keniscayaan bagi Kerajaan Siak yang mengalami kemunduran dan dijuluki "*het donkere zuiden*". Oleh karena itu, menarik ketika pihak kerajaan turut serta mengambil kebijakan menyelenggarakan pendidikan. Sultan Syarif Kasim II sejak dilantik pada tahun 1915 menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan di wilayahnya. Apa dan bagaimana pendidikan pada masa kekuasaan Sultan Syarif Kasim II akan dipaparkan berikut ini.

Pembahasan

A. Melek Pendidikan

Hampir tidak ada persoalan tentang kebebasan bagi kaum laki-laki dalam budaya patriarkhi, termasuk budaya Melayu. Memang perempuanlah yang dihadapkan banyak pantang larang dan keterbatasan karena pingitan atau pembatasan ke luar rumah. Akan tetapi, pada umumnya perempuan Melayu sama dengan kaum laki-laki menerima

pendidikan agama sejak anak-anak. Anak laki-laki dan perempuan pergi mengaji ke rumah guru, tetapi ada juga, terutama anak-anak perempuan yang belajar mengaji dengan ibu mereka. Kegiatan belajar agama anak-anak perempuan dijalani sampai menginjak dewasa atau *akil baligh*. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan Melayu di Kerajaan Siak pada awal abad ke-20 umumnya pandai baca-tulis aksara Arab Melayu.



Istana Asseraya Hasyimiah di Siak Sri
Indrapura

Kegiatan pendidikan biasanya berlangsung pada sore atau malam hari, bertempat di rumah, dan menjadi tanggung jawab para orangtua untuk mengajarkan anak-anak mereka. Pendidikan seperti ini biasanya disebut belajar mengaji al-Qur'an. Ada juga pendidikan yang diselenggarakan di rumah seorang guru dalam bentuk pengajian. Anak-anak Melayu juga mendapatkan pelajaran tentang nilai-nilai kehidupan yang diajarkan dengan cara bersyair atau menyampaikan hikayat. Mereka juga sejak kecil sudah diajarkan adat sopan santun dan bertingkah laku yang baik terhadap orang tua, datuk dan nenek, serta saudara. Selain pendidikan agama yang dilangsungkan di sebuah rumah atau di rumah seorang guru, di Kerajaan Siak pendidikan agama juga dilangsungkan di surau atau di mesjid.

B. Dari Tradisional ke Modern

Sebelum penduduk bumiputera mengenal sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, di berbagai daerah di Indonesia telah ada pendidikan agama Islam. Pendidikan ini disebut pendidikan tradisional karena sistem pelaksanaannya yang berbeda dengan pendidikan cara Barat yang disebut dengan pendidikan modern. Pendidikan modern menurut Mestoko (1986: 84) dan Sjamsuddin (1993: 4) menggunakan sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda, seperti pembagian kelas, lama pendidikan ditentukan, dan program pembelajarannya lebih terkoordinasi serta sistematis.

Selain pelajaran agama, pendidikan tradisional di Kerajaan Siak juga menyinggung tentang sastra karena banyak hikayat atau syair yang beredar (Lutfi, 1999: 388-389). Kegiatan membaca hikayat atau syair ini biasanya berlangsung pada malam hari setelah anak usai mengaji. Pada umumnya, pengajian agama diberikan oleh guru laki-laki. Namun, ada juga guru perempuan yang memberikan pengajian terutama kepada anak-anak perempuan atau gadis dan anak laki-laki yang belum menginjak usia dewasa (Pijper, 1987: 16; Azra, 1999: vii, 108, 117-122).

Dalam praktiknya di langar dan surau, anak-anak dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Hanya di dalam lokal sederhana, anak laki-laki dan perempuan belum *akil baligh* berada di dalam lokal yang sama, duduk dalam kelompok terpisah untuk belajar membaca al-Quran. Pada mulanya hanya anak laki-laki yang belajar di surau. Baru pada tahun 1918 menurut kisah Hamka (1988: 313), ada anak perempuan yang turut belajar di surau, yaitu Rahmah el-Yunusiyah. Ini senada dengan pandangan Azra, Afrianty, and Hefner

(2007: 180) bahwa sampai tahun 1910-an, lembaga pendidikan agama seperti pesantren dan madrasah merupakan lembaga hanya untuk kaum laki-laki. Fakta tersebut disimpulkan Lekkerkerker (1914: 871-876) bahwa Islam pada saat itu tidak simpatik terhadap pendidikan anak gadis.

Penerimaan murid di sekolah modern dipengaruhi oleh tujuan sekolah. Sekolah-sekolah pertama yang didirikan dimaksudkan untuk mendidik pegawai pemerintah. Konsekuensinya ada dua, pertama hanya anak laki-laki yang diterima dan kedua, hanya anak priyayi yang diberikan prioritas utama. Pemerintah Belanda tak pernah mengeluarkan suatu peraturan yang merintangikan penerimaan anak-anak perempuan di sekolah. Sebaliknya juga mereka sangat hati-hati untuk menyuruh anak perempuan bumiputera bersekolah takut kalau-kalau menyinggung adat kebiasaan setempat (Stibbe, 1919: 109; Nasution, 1987:46-47).

Sekalipun sistem pendidikan Barat pada awal abad ke-20 kian berkembang dan menjangkau kaum bumiputera secara luas, terutama karena didorong oleh Politik Etis pemerintah kolonial, tetapi tidak berarti lembaga pendidikan Islam tradisional seperti surau, mesjid, atau pesantren menjadi surut. Para orang tua di Sumatera Timur lebih tertarik memasukkan anak-anak mereka ke lembaga pendidikan agama yang disebut lembaga *kuttab*. Tidak mengherankan lembaga ini tumbuh kian subur, antara lain di Bagan Siapi-Api yang merupakan wilayah Kerajaan Siak. Masih banyak orang tua yang menganggap bahwa memasukkan anak ke sekolah pemerintah bertentangan dengan norma-norma agama dan adat.

Dapat dikatakan terdapat dua bentuk pendidikan di Indonesia pada

awal abad ke-20 dan jurang di antara keduanya cukup tajam. Ada pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Belanda, dikelola secara teratur atau modern, tidak memberikan pelajaran agama, dan menghasilkan golongan yang mendapat pendidikan sekuler. Lainnya adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Islam, bertempat di surau, masjid, atau lembaga *kuttab*, mengajarkan pelajaran agama saja dan bersifat tradisional. Pendidikan tradisional kian lama kian mundur terdesak oleh pendidikan Barat (Yunus, 1960: 199).

Organisasi-organisasi yang dipandang modernis atau pembaharu seperti, Jami'at al-Khair, al-Irsyad, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah berusaha mengurangi perbedaan antara golongan terpelajar dari sekolah-sekolah Belanda dan golongan terpelajar dari lembaga pendidikan agama tradisional (Ali, 1971: 16; Azra, 1999: 36-37). Muncullah pendidikan jalan tengah melalui pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia menuju pendidikan modern, baik dengan mengadopsi sebagian saja sistem pendidikan modern dan menerapkannya kepada institusi pendidikan Islam tradisional, maupun dengan meniru sebagian besar sistem pendidikan barat, seperti membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama Islam dan pengetahuan umum. Muhammadiyah dengan Aisyiah (1917) misalnya, giat memperjuangkan pendidikan, baik untuk laki-laki maupun untuk kaum perempuan, dengan membuka sekolah-sekolah yang mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum.

C.Mekanisme Pertahanan Diri dan Upaya Mengangkat Marwah

Pendidikan menjadi bidang perhatian Sultan Syarif Kasim II selama masa kekuasaannya (1915-1945). Di bidang pendidikan inilah ia dapat menyalurkan pendiriannya tentang Islam dan Nasionalisme. Pada saat ia dilantik sebagai Sultan ke-12 pada tahun 1915, pendidikan modern yang ada di Kerajaan Siak sangatlah terbatas dan hanya sekolah yang dikelola oleh Pemerintah Hindia Belanda atau *gouvernementscholen*. Ada sebuah *Hollandsch Inlandsche School* (HIS), sekolah-sekolah desa (*Volksscholen*), dan *Inlandsch Scholen* di Siak Sri Indrapura, Selat Panjang, dan Bagan Siapi-Api (Plas, 1917: 122). Tidak lama kemudian, ia segera mendirikan lembaga pendidikan Islam modern yang disebut dengan Madrasah Taufikiyah (1917).



Sultan Syarif Kasim II (1893-1968)

1. Madrasah Khusus Laki-Laki

Sultan Syarif Kasim II memahami dilema yang dihadapi rakyatnya pada waktu itu. Di satu sisi, politik pendidikan Hindia Belanda baik disengaja maupun tidak, telah menyinggung sentimen keagamaan dan nasionalisme penduduk bumiputera. Pendidikan *gouvernement* telah

menjauhkan anak-anak dari norma agama dan adat-istiadat Melayu. Pengajarannya pun sangat Belanda sentris. Kurikulum di HIS Siak Sri Indrapura tidak mencakup mata pelajaran tentang sejarah karena dikhawatirkan dapat membangkitkan kesadaran murid akan tanah air. Tidak heran, jika sejak awal Sultan tidak menyukai kebijakan pemerintah kolonial terhadap sekolah Melayu berbahasa Belanda tersebut. Di sisi lain, akses ke dalam, keberadaan lembaga pendidikan Islam tradisional dilihat dari sistem pengajarannya tidak efisien dan kurang bermutu. Ada keluhan masyarakat tentang kondisi lembaga *kuttab* yang tidak dikelola dengan baik sehingga cenderung merugikan murid; akses keluar, keberadaan pendidikan partikelir sangat tidak menguntungkan karena kecurigaan dan pembatasan pendidikan partikelir yang mulai dilakukan pemerintah kolonial melalui ordonansi. Oleh karena itu, dua tahun setelah Pemerintah Belanda mendirikan HIS Siak Sri Indrapura (1915), Sultan Syarif Kasim II segera mendirikan Madrasah Taufikiyah yang mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum dengan sistem modern. Di madrasah ini semangat nasionalisme mendapat tempat, bahkan murid-murid mengidolakan tokoh-tokoh pergerakan nasional Indonesia, terutama dari kalangan Muslim (Wilaela, 2012: 208-210).

Masyarakat Siak, seperti para pemuka masyarakat dan tokoh organisasi tidak ketinggalan dalam merespon pendidikan modern. Mereka juga segera membuka sekolah partikelir, seperti HIS Muhammadiyah di Bagan Siapi-Api, Bengkalis dan Pekanbaru; dan HIS Taman Siswa Selat Panjang. Masyarakat pun bisa menerima

sistem pendidikan modern jalan tengah ini. Sultan Syarif Kasim II memberikan perhatian kepada pendidikan partikelir dengan rajin mengunjungi sekolah-sekolah tersebut. Ia juga hampir menerapkan wajib belajar (*leerplicht*) kepada penduduknya dan tidak menolerir para orang tua yang mengabaikan pendidikan anak-anak mereka.

Memang pendidikan jalan tengah ini segera menemukan momentumnya karena ketidaksukaan rakyat kepada politik pendidikan Hindia Belanda yang terkait dengan politik asosiasi (*associatiepolitiek*) (Dekker, 1913: 439-446; Brugmans, 1938: 289-290; Hurgronje, 1977: 157). Apalagi sikap enggan pemerintah kolonial Belanda dalam memajukan pendidikan rakyat Indonesia membuat kalangan nasionalisme dan kalangan Islam terutama, giat menyelenggarakan pendidikan modern. Mereka setuju dengan sistem pendidikan modern yang diperkenalkan Belanda, tetapi mereka keberatan dengan sistem pendidikan *gouvernement* dan menolak subsidi pemerintah kolonial. Sekalipun demikian, menurut van Niel (2009: 310), keberadaan sekolah-sekolah Muhammadiyah umumnya diakui oleh pemerintah Belanda, tidak dipandang sebagai sekolah liar (*wilde scholen*), dan diberikan subsidi.

2. Sekolah Khusus Perempuan

Dalam sistem pendidikan tradisional, anak gadis sesungguhnya telah mendapatkan berbagai pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk kehidupan berumah tangga. Salah satu keterampilan yang perlu dimiliki oleh gadis-gadis Siak adalah menenun atau menyulam yang dilatih tatkala mereka berkurung. Sambil

menenun, gadis-gadis biasanya bersyair dan bersenandung. Bersyair menurut U.U. Hamidi (2002: 134) adalah kegiatan membacakan berbagai syair dan hikayat dengan lagu yang merdu. Syair dan hikayat yang dibacakan biasanya banyak mengandung nilai-nilai agama Islam dan memiliki manfaat bagi pendidikan. Dalam *Atlas Kebudayaan Melayu Riau* (al-Azhar *et al.*, 2005: 69), bersenandung itu menyanyi lagu pelipur lara yang biasa dilakukan oleh anak muda di Bengkalis dengan perkataan yang berisi kerinduan atau perasaan yang sedih karena sedang berpisah dengan kekasih atau karena lainnya. Bersenandung juga dilakukan untuk membuai dan menidurkan anak. Dapat dikatakan selain belajar agama, anak perempuan Melayu juga belajar keterampilan produktif, seperti merenda, menyulam, atau menenun yang terkait dengan kebiasaan berkurung.

Seiring dengan semangat pergerakan pada awal abad ke-20, pendidikan (*onderwijs*) menjadi tuntutan terkuat yang diajukan oleh kalangan bumiputera. Adapun pendidikan untuk anak perempuan (*meisjesonderwijs*), lambat laun dapat diterima di tengah masyarakat, walaupun tetap menuai kontroversi. Setidaknya reaksi masyarakat berkisar pada perlu tidaknya perempuan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari Sekolah Desa atau sekolah Melayu Kelas Dua.

Pertama, mereka yang menginginkan perempuan perlu masuk sekolah modern yang terkait dengan fungsi femininitas dan peran perempuan di ranah domestik. Bahkan kalau perlu ke jenjang yang lebih tinggi dari sekolah rendah. Sebab, pendidikan bagi perempuan akan mengarahkannya untuk menjadi ibu sejati, sebagai pendidik

pertama dan utama bagi anak-anaknya. Perempuan tidak hanya perlu mengetahui cara mengurus rumah tangga (*huishouden*) seperti pekerjaan dapur, mengurus orang sakit, mengasuh dan mendidik anak (*opvoeden*) serta ilmu kesehatan (*hygiene*), tetapi juga pekerjaan tangan (*handwerken*) seperti jahit-sulam, dan menenun atau membatik. Bahkan, anak perempuan perlu memiliki kemampuan berbahasa Belanda standard. Suami-suami pada masa ini juga cenderung menyukai istri yang pintar, karena istri adalah kawan bermufakat dan bersepakat, dalam susah dan senang.

Kedua, mereka yang beranggapan bahwa anak perempuan cukup bersekolah rendah (*lagere scholen*) setingkat *Volksschool* atau *Gouvernement Inlandsch School* saja. Sekolah tersebut dapat dijalani oleh anak-anak perempuan sebelum mereka menginjak usia akil baligh dan harus berkurung. Hal ini dapat menjelaskan mengapa jumlah murid laki-laki jauh melebihi murid perempuan di semua jenjang pendidikan. Jumlah anak perempuan bersekolah di Indonesia berdasarkan statistik tahun 1933/1934 belum setengah juta (yaitu 546.809 orang) dari 17 juta lebih anak yang harus bersekolah.

Sikap defensif terhadap pendidikan barat dan keyakinan teguh terhadap apa yang pantang dan apa yang dibolehkan menurut adat membuat Tengku Agung permaisuri Sultan Syarif Kasim II mengupayakan bentuk dan tujuan pendidikan yang berbeda dari bentuk pendidikan tradisional yang sudah berlangsung cukup lama dan pendidikan modern yang dibawa oleh pemerintah kolonial. Bentuk pendidikan ini merupakan bentuk pendidikan jalan tengah, yang mengakomodir pendapat-pendapat tentang pendidikan anak

perempuan dan untuk mengakhiri kontroversi antara pendapat yang membolehkan anak gadis mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan pendapat yang menyatakan bahwa anak gadis cukup mengenyam pendidikan rendah saja.

Pendidikan jalan tengah ini haruslah pendidikan khusus untuk anak perempuan saja (bukan ko-edukasi) dan menyiapkan mereka sebagai calon ibu rumah tangga dan pendidik bagi keluarga mereka kelak. Tengku Agung (1896-1929) kemudian membuka Sultanah Latifah School di Siak Sri Indrapura, terletak persis di samping Istana Asseraya pada tahun 1927. Sekolah khusus perempuan ini setingkat sekolah desa tiga tahun yang mengajarkan pelajaran membaca dan menulis, mengajarkan cara mengurus rumahtangga, melatih ketrampilan, pendidikan budi pekerti dan Bahasa Belanda. Pendidikan ketrampilan atau pekerjaan tangan yang diistilahkan oleh Abdul Ghaban (*Bintang Hindia*, 4 Mei 1929) dengan pendidikan asli anak negeri itu diutamakan yang dapat bernilai produktif yang sesuai dengan peran gender kaum perempuan sebagai pengurus rumah tangga dan pendidik anak.



Tengku Agung (1896-1929) Pendiri Sultanah Latifah School

Usaha yang dilakukan oleh Tengku Agung dan didukung sepenuhnya oleh Sultan Syarif Kasim II ini mengikuti semangat zaman. Pendidikan untuk mendukung kemandirian kaum perempuan telah dilakukan oleh Kartini (1879-1904) dari Jawa Tengah, kemudian Dewi Sartika (1884-1947) dari Jawa Barat, Rohana Kudus (1884-1974) dari Bukittinggi dan Rahmah el-Yunusiyah (1900-1969) dari Padang Panjang. Ide Tengku Agung untuk mendirikan sekolah khusus perempuan diinspirasi dari lawatannya ke Medan dan kenangannya terhadap kehidupan masa kecilnya di Tanjungpura, Langkat. Pada waktu itu, hampir di setiap ibukota kerajaan di Sumatera Timur terdapat sekolah khusus perempuan, antara lain Sekolah Derma di Medan, ibukota Kerajaan Deli.

Sultanah Latifah School bertujuan untuk meningkatkan kualitas perempuan Siak yang berperan penting dalam ranah domestik. Khusus untuk keterampilan menenun, menurut sumber lisan, Tengku Agung dan kemudian Tengku Maharatu bertindak sebagai guru. Mereka mengajarkan menenun di asrama (*internaat*) terutama kepada murid-murid yang menjadi dayang-dayang dan perempuan-perempuan yang tinggal di dalam lingkungan Istana Siak. Dalam biografi Masajo (Yusuf, 2007), seorang murid Sultanah Latifah School, dikisahkan ia pernah belajar menenun dari Tengku Agung. Hal senada dituturkan oleh Encik Hasnah (71 tahun) yang mendapatkan keterampilan menenun dari neneknya, Hajah Aminah, dan neneknya belajar menenun dari Tengku Agung. Sultanah Latifah School masih berdiri hingga bala tentara Jepang memasuki Siak Sri Indrapura pada tahun 1942. Sejak saat itu, sekolah tersebut dialihkan sebagai Sekolah

Rakyat. Sekalipun keberadaannya terhitung singkat, tetapi sekolah ini telah berperan dalam diseminasi kerajinan tenun siak.

3. Madrasah Khusus Perempuan

Madrasah Annisa didirikan pada tahun 1929 sebagai sekolah agama khusus perempuan. Letak madrasah yang terdiri dari tingkat ibtidaiyah 4 tahun dan tsanawiyah 3 tahun ini terletak di depan alun-alun sejajar dengan tampak muka Istana Asseraya (Muthalib, 83 tahun). Latar belakang didirikan lembaga ini terkait dengan keberadaan Sultanah Latifah School yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan zaman, karena hanya mengajarkan keterampilan, sementara pendidikan agama hanya bersifat ekstra.



Bangunan peninggalan Madrasah Annisa, berada di samping Istana Asseraya Hasyimiah, di Siak Sri Indrapura (Foto dokumen pribadi).

Pembukaan Madrasah Annisa dapat juga dilihat dalam perspektif simbol perlawanan Sultan Syarif Kasim II kepada penguasa Belanda. Hanya dalam bidang pendidikan sultan dapat lebih banyak menunjukkan sikap anti Belandanya. Sultan dan Tengku Maharatu (lahir 1913), permaisuri setelah Tengku Agung mangkat, menerapkan pendidikan gratis bagi anak

perempuan di Siak. Mereka mengadakan kerja sama dengan Diniyah School Putri di Padang Panjang antara tahun 1934 hingga tahun 1941 dan menjelang Jepang masuk ke Siak. Kesejahteraan para guru, seperti penyediaan asrama dan pembayaran gaji langsung di bawah pengawasan sultan dan permaisuri.

Di Madrasah Annisa diajarkan pelajaran agama meliputi membaca al-Qur'an, ibadah shalat, Rukun Islam, Rukun Iman, Tauhid, Fiqh, Hadis, dan Kesenian Arab. Pengetahuan umum yang diajarkan meliputi ilmu bumi, menulis Bahasa Arab, Bahasa Melayu, dan keterampilan perempuan. Murid-murid diajarkan pekerjaan tangan, seperti menyulam, menerawang, menjahit, membuat perlengkapan anak-anak seperti topi dan kaos kaki, dan lain-lain. Pada tingkat Tsanawiyah, ditambah mata pelajaran baru, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, ilmu ukur, beberapa keterampilan, dan lain-lain. Selain telah menerapkan sistem kelas dan mata pelajaran tertentu yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum, Madrasah Annisa juga memberikan ijazah atau surat keterangan tamat belajar bagi murid-murid yang telah menamatkan pendidikannya di sana. Madrasah Annisa ditutup dan sekolahnya bersama dengan Madrasah Taufikiyah dijadikan MTsN Siak Sri Indrapura.

Simpulan

Pendidikan modern yang diperkenalkan Pemerintah Hindia Belanda pada awal abad ke-20 disikapi berbeda-beda oleh masyarakat di Kerajaan Siak. Ada yang tetap mempertahankan pendidikan tradisional, tetapi segera menjadi tidak menarik bagi masyarakat luas dan dalam suasana kebangkitan nasional tersebut. Ada juga

masyarakat yang mengadopsi sebagian sistem pendidikan modern sehingga menjadi madrasah, dan ada yang membuka sekolah dan mengadopsi sebagian besar sistem pendidikan barat dan memasukkan pendidikan agama Islam. Bedanya dengan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial terletak pada mata pelajaran agama dan nilai-nilai keindonesiaan.

Berbagai ekses sosial budaya, agama dan kebangsaan yang dirasakan oleh masyarakat di Kerajaan Siak karena anak-anak bumiputera bersekolah di sekolah pemerintah membuat mereka mendirikan sekolah partikelir. Sekolah-sekolah tersebut merupakan jalan tengah atas dilema terhadap kebutuhan pendidikan modern tetapi tidak ingin belajar di sekolah Belanda. Alasannya didasari oleh perasaan kebangsaan dan sentimen keislaman. Bahkan pendidikan jalan tengah ini merupakan mekanisme pertahanan diri mereka terhadap politik pendidikan Hindia Belanda yang erat terkait dengan politik asosiasi.

Sultan Syarif Kasim II berinisiatif membuka lembaga pendidikan agama dengan sistem modern yang dikenal dengan nama Madrasah Taufikiyah al-Hasyimiah (1917) sebagai jalan tengah untuk kekurangan pendidikan tradisional yang diselenggarakan masyarakat dan pendidikan modern yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Sekolah khusus perempuan bernama Sultanah Latifah School (1927) juga dibuka sebagai jalan tengah antara pendapat yang menganggap perempuan perlu bersekolah modern bahkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan pendapat sebaliknya bahwa perempuan cukup mengenyam pendidikan tradisional dan pendidikan modern tingkat rendah saja yang dapat dilakukan sebelum akil baligh. Madrasah Annisa

(1929) juga didirikan sebagai pelengkap dari kekurangan Sultanah Latifah School dalam pendidikan agama Islam.

Pendidikan jalan tengah pada masa Sultan Syarif Kasim II ini merupakan sikap politis Pemerintah Landschap Siak terhadap kolonialisme, untuk menaikkan pamor dan prestise kerajaan yang menurun, dan untuk kontinuitas peran dan fungsi kerajaan-kerajaan Melayu sebagai pengembang agama Islam dan pendidikan.

Daftar Pustaka

Algemeen Verslag van het Inlandsch Onderwijs in Nederlandsch Indie over 1914. Eerste Deel. Tekst. Batavia: Landsdrukkerij. 1916. KITLV.

Ali, A. Mukti. 1971. *Beberapa Masalah Pendidikan di Indonesia. Bagian Lampiran Rencana Pelajaran Pekerjaan Tangan/Pertanian pada Madrasah Wajib Belajar 8 Tahun*. Jogyakarta: Nida.

Al-Azhar *et al.* 2008. *Atlas Kebudayaan Melayu Riau*. Pekanbaru: Unri.

Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Jakarta: Logos.

_____. *et al.* 2007. "Pesantren and Madrasa: Muslim Schools and National Ideals in Indonesia", dalam Robert W. Hefner and Muhammad Qasim Zaman. *Schooling Islam: The Culture and Politics of Modern Muslim Education*. Princeton and

Oxford: Princeton University Press; pp. 172-198.

Barnard, Timothy P. 2006. *Pusat Kekuasaan Ganda: Masyarakat dan Alam Siak dan Sumatera Timur 1674-1827*. Terjemahan Sita Rohana. Pekanbaru: Unri Press.

Brugmans, I.J. 1938. *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch-Indie*. Groningen-Batavia: J.B. Wolters' Uitgevers-Maatschappij.

_____. 1987. "Politik Pengajaran", dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans. *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terjemahan Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; hlm. 176-194.

Creutzberg en Hardeman. 1916. *Het Onderwijs in Nederlandsch Indië*. Drukkerij Korthuis: 's Gravenhage.

Dekker, Deuwes. 1913. "Assosiatie Politiek", *Koloniaal Tijdschrift*. Tweede Jaargang. EersteHalfjaar; pp. 439-446.

Hamka. 1988. *Ayahku: Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera*. Cetakan Keempat. Jakarta: Umminda.

Harahap, Abdul Manan (79 tahun). Pernah menjadi guru di Madrasah Taufikiyah dan Madrasah al-Nisa. *Wawancara*.

- Siak Sri Indrapura, 1 November 2009.
- Hasnah, Encik (1971). Tokoh Perempuan Riau yang melestarikan Tenun Siak. *Wawancara*. Pekanbaru, 30 Juni 2009.
- Hurgronje, C. Snouck. 1973. *Islam di Hindia Belanda*. Terjemahan. S. Gunawan. Kata Pengantar Taufik Abdullah. Jakarta: Bhratara.
- _____. 1977. The Ideal of Association 1911”, dalam Penders. Chr. L.M. (ed.& Transl). *Indonesia: Selected Documents on Colonialism and Nationalism 1830-1942*. Queensland: University of Queensland; pp.157-165.
- Jamil, O.K. Nizami. 73 tahun. Ketua LAM Siak dan Pengurus LAM Riau. *Wawancara*. Pekanbaru. 30 Oktober 2009.
- Lekkerkerker, C. 1914. Meisjesonderwijs, Coeducatie, en Meisjesscholen voor de Inlandsche Bevolking in Nederlandsch-Indië”, *Kolonial Tijdschrift*. Van den 3en jaargaang tweede halfjaar; pp. 865-884.
- Mestoko, Sumarsono *et al.* 1985. *Pendidikan di Indonesia: Dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Depdikbud dan Balai Pustaka.
- Muthalib, Rugayyah binti Lebai Abdul (84 tahun). Murid Madrasah al-Nisa. *Wawancara*. Siak Sri Indrapura, 1 Nov. 2009.
- Nasution, S. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Edisi Kedua. Bandung: Jemmars.
- Van Niel, Robert. 2009. *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Terjemahan Zahara Deliar Noer. Cetakan Kedua. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya.
- Pijper, G.F. 1987. Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (peny.). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*. Terj. Amir Sutaarga. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia; hlm. 238-271.
- Plas, van der. 1917. *Memorie van Overgave (MvO) Gouverneur der Oostkust van Sumatra*. Den Haag: Nationaal Archief.
- Stibbe, D.G. (red.) 1919. *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië*. Tweede Druk. Deerde Dee. N-Soema.'s Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Suwardi, dkk. *Sultan Syarif Kasim II Sultan Siak Sri Indrapura (1915-1945)*. Bengkalis: Pemda Tingkat II Bengkalis; hlm 15-25.
- Yunus, Mahmud. 1960. *Sedjarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Mahmudiah.